



OPTIMALISASI DIPLOMASI MARITIM DI NATUNA UTARA GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN STRATEGI PERTAHANAN DI LAUT

Surya Hendra Junianto¹⁾, Dwi Soediantono²⁾, M. Al-Amin³⁾

^{1,2,3)}Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

Abstrak

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan berarti bahwa pertahanan Indonesia secara logis harus berkarakter maritim. Kebijakan pemerintah RI dibawah pimpinan Bapak Presiden RI Joko Widodo, untuk mewujudkan nya ada tujuh pilar sektor maritim sebagai prioritas pembangunan nasional. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai bangsa maritim harus diimplementasikan dalam sistem pertahanan negara khususnya di laut. Pada perkembangan lingkungan strategis saat ini di Natuna Utara, Indonesia telah memperkuat kehadiran unsur-unsur militernya di Natuna Utara dimana wilayah itu tumpang tindih dengan wilayah yang diakui sebagai kedaulatan Cina. Indonesia sebagai negara kepulauan, diharapkan mampu menerapkan diplomasi maritim secara maksimal, yang pada akhirnya dapat menunjang strategi pertahanan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pertahanan negara di laut sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal baik pengaruh regional maupun internasional. Agar pengaruh lingkungan di sekitar Indonesia sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya diplomasi yang dapat menjadi penunjang kerjasama antar negara serta mencegah timbulnya konflik antar negara. Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk mewujudkan diplomasi maritim yang disegani oleh negara-negara luar maka perlu adanya kehadiran kekuatan militer dalam mendukung sistem pertahanan negara di laut sehingga untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat tercapai.

Kata Kunci: Diplomasi, Pertahanan, Maritim, Geografis

*Correspondence Address : Suryaseskoal2020@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.279-287

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) dikemukakan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam kampanyenya pada pemilihan umum tahun 2014. Gagasan itu terangkum melalui paparan visi misi dan program aksi yang disusun setebal 41 halaman dengan judul Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Visinya adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong", yang berusaha diwujudkan melalui sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan Nawa Cita (Rijal, 2013).

Kebijakan PMD dalam pemerintahan Presiden RI Bapak Joko Widodo akan dapat cepat terwujud jika pertahanan negara, khususnya pertahanan di wilayah perairan sangat kuat. Pertahanan di wilayah perairan mulai dari perairan yurisdiksi sampai dengan laut lepas yang berhubungan dengan kepentingan Indonesia akan mendukung terwujudnya PMD, apabila terlaksana melalui strategi pertahanan maritim yang baik.

Selanjutnya di dalam pelaksanaan strategi pertahanan maritim, lingkungan regional maupun global akan senantiasa memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif. Agar pengaruh lingkungan di sekitar Indonesia sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya diplomasi yang dapat menjadi penunjang kerjasama antar negara serta mencegah timbulnya konflik antar negara. Indonesia sebagai negara kepulauan, diharapkan mampu menerapkan diplomasi maritim secara maksimal, yang pada akhirnya dapat menunjang strategi pertahanan yang dilaksanakan.

TNI AL dalam diplomasi maritim melaksanakan peran diplomasi angkatan laut (*Naval Diplomacy*) yang merupakan penggunaan kekuatan laut dalam mendukung kebijakan luar negeri

pemerintah dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan suatu negara pada masa damai atau pada situasi konflik/perang. Adanya ancaman di Laut Natuna Utara merupakan dampak dari kurang optimalnya diplomasi maritim.

Diplomasi maritim yang dilaksanakan oleh TNI AL saat ini belum maksimal dengan adanya beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Diketahui kehadiran unsur KRI di Laut Natuna Utara masih tergolong kurang, perbatasan antar negara di wilayah perairan belum menemukan kesepakatan serta belum sinerginya seluruh institusi negara yang memiliki kewenangan di Laut Natuna Utara.

Diharapkan permasalahan tersebut dapat dicarikan pemecahan permasalahannya, sehingga diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara dapat meningkat, yang selanjutnya berdampak positif pada pelaksanaan strategi pertahanan maritim serta mempercepat perwujudan Indonesia sebagai PMD.

Agar diplomasi maritim TNI AL dapat optimal, maka permasalahan-permasalahan yang ada harus dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Pemecahan masalah dilaksanakan dengan membuat kebijakan, strategi serta upaya untuk meningkatkan kehadiran unsur KRI, memperjelas batas antar negara di perairan serta meningkatkan sinergitas institusi yang memiliki wewenang di Laut Natuna Utara. Pemecahan masalah tersebut dijabarkan dalam upaya-upaya melalui metode edukasi, latihan, regulasi, kerjasama, sosialisasi dan evaluasi oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pertahanan negara di laut.

METODE PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan

tentang optimalisasi peran diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan metode menggunakan metode deduktif deskriptif analisa yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil keputusan dan kebijakan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan lingkungan strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan pengambilan data berasal dari studi litelatur berupa buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Pelaksanaan studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan berkaitan topik ataupun masalah penelitian yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang posisinya berada di persimpangan dua samudera, membuat Indonesia tidak bisa mengabaikan permasalahan keamanan di kawasan yang terkait dengan maritim. Perairan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan internasional yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian dunia. Ini artinya, selain Indonesia harus menjamin keamanan maritim di perairan yurisdiksinya, Indonesia juga harus peduli dan menaruh perhatian terhadap berbagai permasalahan keamanan maritim di Kawasan, utamanya di kawasan Asia Tenggara, karena jika permasalahan keamanan maritim tersebut tidak tertangani dengan baik, akan berdampak terhadap kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Untuk menjadi poros maritim dunia, Indonesia juga harus

mampu merespon dan turut berperan serta secara aktif dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan keamanan maritim di kawasan.

Peran diplomasi dengan menggunakan unsur-unsur KRI merupakan sebuah sarana untuk “*show of force*” guna memberikan efek penggentar bagi lawan atau bakal lawan sehingga akan mampu mengurungkan niat mereka untuk mengancam kedaulatan dan keamanan di wilayah NKRI. Kemampuan diplomasi TNI AL diselenggarakan dengan mengkombinasikan *Hard Power* dan *Soft Power* dalam bentuk *smart power* pada setiap kesempatan berinteraksi dengan negara lain. Diplomasi tersebut menunjukkan hasil nyata ketika secara signifikan memberikan kontribusi nyata pada pencapaian kepentingan nasional sekaligus dapat diterima dan diakui oleh negara negara di Kawasan.

Dalam pemecahan masalah yang merupakan suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera dibutuhkan suatu tahapan pemecahan masalah yaitu perumusan masalah, perumusan strategi dan Pelaksanaan upaya-upaya terkait sebagai penjabaran dari strategi yang sudah ditetapkan (Riadi, 2016).

Perumusan kebijakan diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam menentukan strategi pencapaian tujuan yang selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk upaya-upaya nyata. Bentuk pemecahan masalah merupakan rumusan dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan yang berisi kebijakan, strategi, dan upaya. Perumusan kebijakan sebagai solusi dalam pemecahan masalah yang terdiri atas pokok persoalan dengan mempertimbangkan faktor peluang dan kendala sesuai dengan indikator keberhasilan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 1. Ringkasan Pemecahan Masalah

Pokok persoalan	Belum optimalnya diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya poros maritim dunia.
Masalah yang ditemukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kehadiran unsur KRI dan pesud TNI AL dilaut Natuna Utara dalam mengamankan perairan yuridiksi nasional. 2. Masih adanya batas wilayah maritim dengan negara tetangga yang belum terselesaikan sehingga berdampak terjadinya pelanggaran wilayah oleh kapal asing. 3. Belum optimalnya kerjasama dan sinergitas dari seluruh <i>stakeholder</i> di bidang kemaritiman dalam rangka penegakan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia.
Lingkungan Global	<p>Politik. Perkembangan lingkungan strategis dipengaruhi oleh ketegangan dan perebutan pengaruh negara-negara besar.</p> <p>Militer. Indikasi perlombaan senjata dilihat dari persentase penggunaan anggaran belanja negara untuk belanja militer.</p> <p>Ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengubah rupa kebijakan seluruh negara di dunia.</p>
Lingkungan Regional	<p>Politik. Program pemerintah menitikberatkan pada keamanan dan pengembangan ekonomi berbasis maritim</p> <p>Militer. Anggaran belanja pertahanan Indonesia belum mengalami peningkatan signifikan</p> <p>Ekonomi. Perkembangan ekonomi nasional juga mengalami penurunan hingga -5.32% akibat pandemi Covid-19.</p>

Lingkungan Nasional	<p>Politik. Program pemerintah menitikberatkan pada keamanan dan pengembangan ekonomi berbasis maritim</p> <p>Militer. Anggaran belanja pertahanan Indonesia belum mengalami peningkatan signifikan</p> <p>Ekonomi. Perkembangan ekonomi nasional juga mengalami penurunan hingga -5.32% akibat pandemi Covid-19.</p>
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatian pemerintah terkait konflik LCS sangat besar. 2. Adanya sokongan dana pinjaman dari luar negeri . 3. Arah kebijakan politik yang mengembalikan peran TNI pada bidang pertahanan dan adanya kebijakan pengembangan instansi pengamanan yang ada di bawah kelembagaan. 4. segala kepentingan nasional di Laut Natuna Utara menjadi perhatian pemerintah.
Kendala	<p>Berlarut-larutnya pandemi Covid-19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi .</p> <p>Terbatasnya anggaran pertahanan.</p>
Indikasi keberhasilan	<p>Kehadiran unsur KRI TNI AL secara optimal.</p> <p>Perbatasan negara yang jelas.</p> <p>Meningkatnya kerjasama dan sinergitas dari seluruh <i>stakeholder</i> di bidang kemaritiman.</p>

Sumber Tabel : Hasil Olahan Peneliti

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Dalam suatu pemerintahan kebijakan

merupakan suatu hal yang penting. Hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan, kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin.

Untuk mengoptimalkan diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka perlu disusun suatu kebijakan sebagai bagian dari pemecahan masalah yang ada. Kebijakan disusun berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam mengoptimalkan diplomasi maritim TNI AL. Namun demikian dengan adanya Banglingstra yang mempengaruhi, maka tidak bisa dihindari adanya peluang dan kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Peluang dan kendala tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi saat ini, permasalahan yang ditemukan, Banglingstra yang mempengaruhi serta peluang dan kendala yang ada, maka dalam perumusan dan penyusunan optimalisasi diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

“Terwujudnya optimalisasi diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara melalui peningkatan kehadiran unsur KRI TNI AL, memperjelas perbatasan negara serta meningkatkan kerjasama dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* di bidang kemaritiman guna

mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia”

Rumusan kebijakan di atas sebagai keputusan strategis untuk mengarahkan semua langkah yang perlu dilaksanakan terkait optimalisasi diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan ini sebagai pedoman dan pegangan bagi para pengambil keputusan yang terkait dengan diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara supaya terjadi kesepahaman dalam maksud, cara dan sarana untuk mengoptimalkan diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara sehingga tercipta suatu dinamika tindakan yang terpadu, sehaluan dan seirama guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

b. Strategi

Makna strategi pada hakekatnya merupakan sebuah rencana kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran akhir sebuah tujuan beserta suatu sistem penilaian untuk mencapainya. Secara umum strategi itu dapat diartikan sebagai cara (*ways*) untuk mencapai sesuatu tujuan (*ends*) dengan sarana yang tersedia (*means*). Berdasarkan konsep tentang strategi yang disampaikan oleh Liddell Hart, Arthur Lykke Jr. mengembangkan konsep kerangka strategi yang meliputi *ends*, *ways* dan *means*. *Ends* merupakan tujuan atau hasil yang diinginkan dari strategi yang dilakukan. *Ways* adalah tindakan atau metode dan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan *Means* adalah seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan metode dan proses tersebut. Lykke menyatakan pentingnya untuk menyeimbangkan

Ends, Means, dan Ways, yang disamakannya dengan tiga kaki atau pondasi dari strategi. Strategi disebut seimbang dan sedikit mengandung risiko jika dalam mencapai suatu tujuan (*Ends*) digunakan cara (*Ways*) yang tepat, dengan sumber daya (*Means*) yang memadai. Namun, jika salah satu pondasi dari ketiga komponen strategi tersebut terlalu pendek misalnya kekurangan sumber daya atau tujuan dan caranya yang tidak realistis maka hal tersebut akan mendatangkan risiko yang tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah dirumuskan maka selanjutnya dilaksanakan analisa pada teori-teori yang ada dalam landasan pemikiran untuk menetapkan strategi yang tepat dalam optimalisasi diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Strategi 1.

“Mewujudkan peningkatan kehadiran unsur KRI TNI AL di Laut Natuna Utara melalui pengadaan Alutsista TNI AL, sosialisasi tentang kegiatan operasi serta latihan TNI AL, koordinasi untuk peningkatan anggaran operasi latihan TNI AL dan melaksanakan evaluasi kegiatan operasi latihan TNI AL guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia”

Sebagaimana hakekat dari strategi yang terdiri dari tiga komponen yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*) dan sarana (*means*) maka dari strategi 1 yang sudah

dirumuskan di atas akan diurai komponen-komponen strategi yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

- a) Tujuan (*ends*) yaitu mewujudkan peningkatan kehadiran unsur KRI TNI AL di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim.
- b) Cara (*ways*) yaitu dengan cara melaksanakan pengadaan, sosialisasi, koordinasi dan evaluasi.
- c) Sarana (*means*) yaitu Kementerian/Lembaga terkait, penerangan pasukan dan aplikasi.

2) Strategi 2.

“Mewujudkan kejelasan perbatasan negara melalui sosialisasi melalui wadah organisasi internasional, edukasi kepada perwira TNI AL, koordinasi dengan negara tetangga serta evaluasi hasil kesepakatan tentang perbatasan negara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia”

Sebagaimana hakekat dari strategi yang terdiri dari tiga komponen yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*) dan sarana (*means*) maka dari strategi 2 yang sudah dirumuskan di atas akan diurai komponen-komponen strategi yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

- a) Tujuan (*ends*), yaitu memperjelas perbatasan

negara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim.

b) Cara (*ways*), yaitu dengan cara melaksanakan sosialisasi, edukasi, koordinasi, dan evaluasi.

c) Sarana (*means*), yaitu Kementerian/Lembaga terkait, penerangan pasukan dan aplikasi.

3) Strategi 3.

“Mewujudkan peningkatan kerjasama dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* di bidang kemaritiman melalui sosialisasi kegiatan operasi dan latihan TNI AL, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan evaluasi bidang operasi dan latihan TNI AL guna guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia”

Sebagaimana hakekat dari strategi yang terdiri dari tiga komponen yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*) dan sarana (*means*) maka dari strategi 3 yang sudah dirumuskan di atas akan diurai komponen-komponen strategi yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

a) Tujuan (*ends*) yaitu mewujudkan peningkatan kerjasama dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* di bidang kemaritiman guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan

maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim.

b) Cara (*ways*) yaitu dengan cara sosialisasi, koordinasi dan evaluasi.

c) Sarana (*means*) yaitu Kementerian/Lembaga terkait, penerangan pasukan dan aplikasi.

c. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan daya upaya. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya sebagai bagian dari tahapan pemecahan masalah adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Indrawan, 2009). Berbagai upaya yang disusun adalah untuk melaksanakan strategi-strategi yang sudah dirumuskan guna mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan upaya diharapkan dapat dengan jelas menunjukkan siapa yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing terkait optimalisasi diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sesuai dengan teori optimalisasi bahwa optimalisasi merupakan hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, sehingga optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan organisasi. Agar optimalisasi ini dapat tercapai secara efektif dan efisien maka dilaksanakan upaya-upaya yang harus dilakukan

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara. Upaya-upaya yang harus dilakukan sebagai penjabaran dari strategi-strategi tiap permasalahan yang sudah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) mewujudkan peningkatan kehadiran unsur KRI TNI AL di Laut Natuna Utara melalui pengadaan Alutsista TNI AL, sosialisasi tentang kegiatan operasi serta latihan TNI AL, koordinasi untuk peningkatan anggaran operasi latihan TNI AL dan melaksanakan evaluasi kegiatan operasi latihan TNI AL guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka upaya yang harus dilakukan sebagai berikut:
- 2) Mewujudkan kejelasan perbatasan negara melalui sosialisasi di wadah organisasi internasional, edukasi kepada perwira TNI AL, koordinasi dengan negara tetangga serta evaluasi hasil kesepakatan tentang perbatasan negara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka upaya yang harus dilakukan sebagai berikut:
- 3) Mewujudkan peningkatan kerjasama dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* di bidang kemaritiman melalui sosialisasi kegiatan operasi dan latihan TNI AL, koordinasi dengan

Kementerian/Lembaga terkait dan evaluasi bidang operasi dan latihan TNI AL guna guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan pemecahan permasalahan yang ditemukan terkait optimalisasi diplomasi maritim di Laut Natuna Utara guna mendukung pelaksanaan strategi pertahanan maritim dalam rangka terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia maka dapat disimpulkan bahwa diplomasi maritim di Laut Natuna Utara dapat ditingkatkan dengan memperbanyak kehadiran unsur KRI maupun Pesud TNI AL. Kehadiran unsur TNI AL merupakan bentuk diplomasi yang merupakan pelaksanaan *naval diplomacy*, yang dapat ditingkatkan pelaksanaannya melalui pengadaan Alutsista TNI AL, sosialisasi, koordinasi dan evaluasi oleh Mabes TNI, Mabes TNI AL serta Kementerian/Lembaga terkait.

Diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara dapat ditingkatkan dengan memperjelas perbatasan negara. Perbatasan negara yang belum disepakati akan berpengaruh pada kehadiran unsur TNI AL sebagai bentuk *naval diplomacy*. Perbatasan negara RI di wilayah perairan dapat dipecahkan permasalahannya melalui sosialisasi, edukasi, koordinasi, dan evaluasi oleh Mabes TNI, Mabes TNI AL serta Kementerian/Lembaga terkait.

Diplomasi maritim TNI AL di Laut Natuna Utara dapat ditingkatkan dengan peningkatan kerjasama dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* di bidang kemaritiman. Sinergitas dari seluruh *stakeholder* di bidang kemaritiman akan mencegah adanya ego

sektoral institusi yang dapat menghambat pelaksanaan diplomasi maritim. Peningkatan kerjasama dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* di bidang kemaritiman dapat dipecahkan permasalahannya melalui sosialisasi, koordinasi dan evaluasi oleh Mabes TNI, Mabes TNI AL serta Kementerian/Lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Cole, Bernard D, *Asian Maritime strategies : Navigating Trouble Waters* (Anapolis: Naval Institute, 2013)

Indrawan. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media.

Muhar Junef, "Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

Riadi, M. (2016, 04). *Pengertian dan Tahapan Pemecahan Masalah*. Retrieved Mei 7, 2021, from kajianpustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/pengertian-dan-tahapan-pemecahan-masalah.html>

Rijal, N. K. (2013). *Smart Maritime Diplomacy, Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Global dan Strategi.

Trio Sirmareza, 2017 *Naval Diplomacy Dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia Di United Nations Interim Force In Lebanon*

Salamah, Lilik, "Analisa (SWOT): Peluang dan tantangan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam mewujudkan integrasi Asia Tenggara." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 30

Marsetio, Marsetio. "Perairan Bermasalah: Tantangan Maritim Di Asia Pasifik." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 3